



PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2019



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempedomani Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, telah diundangkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020;
- b. bahwa dengan telah diundangkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus, maka Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4 16

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

r f a

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

† q c

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 28), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 46);
25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 64);
26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 28);

+ f_g

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020.






Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 28) yang mengatur Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS : BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIKANG	
5.	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2019

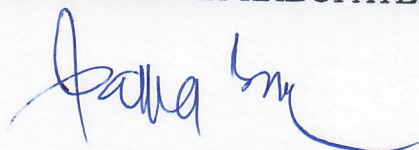
Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

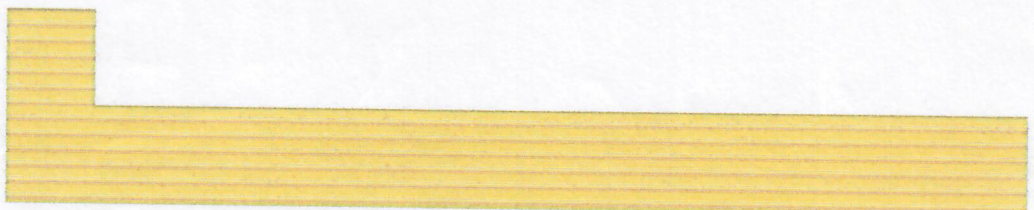
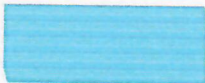


SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 65

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KUDUS NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2020

RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020



* Q 6

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 telah selesai kami susun.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 merupakan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2020 bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023.

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 ini mengacu pada Renstra yang dijabarkan dalam program dan kegiatan setiap tahun, sehingga bisa berlanjut dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah, dan untuk mencari solusi pemecahan dalam menghadapi berbagai masalah aktual.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 ini diharapkan bisa terealisasi sehingga kinerja Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dapat berjalan dengan baik, sesuai harapan dalam mengemban visi dan misi untuk mewujudkan Kudus bangkit menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Kudus pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus di masa yang akan datang pada khususnya.

Y
16

PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka Pemerintah Kabupaten Kudus menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dengan menetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus. Sesuai peraturan diatas, terdapat beberapa perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi beberapa Bagian di Sekretariat Daerah. Oleh karena itu Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 perlu diubah.

Adapun perubahan mendasar dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2020 sebagai penyesuaian dari Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2018	Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019
Asisten Pemerintahan, terdiri dari : 1. Bagian Tata Pemerintahan 2. Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : 1. Bagian Pemerintahan 2. Bagian Hukum 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat
Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : 1. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari : 1. Bagian Perekonomian 2. Bagian Administrasi Pembangunan 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Asisten Administrasi terdiri dari : 1. Bagian Organisasi 2. Bagian Perlengkapan dan	Asisten Administrasi Umum terdiri dari : 1. Bagian Organisasi

+ 12

Keuangan 3. Bagian Umum	2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 3. Bagian Umum
----------------------------	---

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Handwritten signature

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

K J L

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218);
24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 46);

14

25. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 64);
26. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 28);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 dalam upaya mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan pada Sekretariat Daerah serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan dokumen ini adalah :

1. menyediakan dokumen perencanaan tahunan Sekretariat Daerah;
2. menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan;
3. sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. sinkronisasi substansi dokumen perubahan RKPD 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

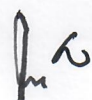
Sistematika Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 disusun sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang perubahan, landasan hukum, maksud, tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun Lalu.

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun sebelumnya (2019), memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah tahun n-1 (2019). Format tabel 2.1 yang digunakan tercantum sebagaimana terlampir.

✶ 

Bab III. Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020

Bab ini memuat usulan dan revisi kegiatan perubahan. Format tabel 3.1 yang digunakan tercantum sebagaimana terlampir.

Bab IV. Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran serta memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.

* f v

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN LALU

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah memuat revidi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 yang merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 Kabupaten Kudus. Penyusunan perubahan rencana program/kegiatan tahun 2020 memperhatikan rencana capaian kinerja tahun 2019, pencapaian target Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 serta realisasi pelaksanaan APBD Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2019 sebagai berikut:

1.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategis SKPD pada Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Belanja Langsung pada awal RKPD terdiri dari 8 program 18 kegiatan. Realisasi sampai dengan triwulan IV adalah sebagai berikut:

a. Bagian Tata Pemerintahan

1. Program Pelayanan Administrasi Umum :

1.1. Kegiatan Peningkatan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 4.027.000,- (80,55%), sedangkan realisasi output/fisik adalah 1 dokumen;

1.2 Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 152.928.000,- (84,16%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%; dan

1.3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 23.129.000,- (77,1%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

2. Program Fasilitas Tata Pemerintahan;

1.1. Kegiatan Fasilitas Pemerintahan Daerah.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 76.086.000,- (93,41%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%; dan

f q u

1.2. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Kerjasama.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 153.398.000,- (74,83%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

b. Bagian Hukum

1. Program Pelayanan Administrasi Umum :

1.1. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 72.060.000,- (81,55 %), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%; dan

1.2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 21.301.000,- (41,62 %), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

2. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Penegakan HAM :

2.1 Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 121.056.000,- (75,55%), sedangkan realisasi fisik mencapai 386,15%;

2.2 Kegiatan Pengkajian dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 93.044.000,- (73,18%), sedangkan realisasi fisik mencapai 50,66 %; dan

2.3 Kegiatan Fasilitasi Penanganan Masalah Hukum dan Penegakan HAM.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 315.702.000,- (77,77%), sedangkan realisasi fisik mencapai 57,14%.

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat

1. Program Pelayanan Administrasi Umum :

1.1. Kegiatan Peningkatan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 242.000,- (11,52%), sedangkan realisasi output/fisik adalah 2 dokumen;

1.2. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan.
Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 138.313.000,- (75,56%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%; dan

1.3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur.
Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp.44.808.000,- (81,81%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

2. Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat :

2.1. Kegiatan Fasilitasi dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial.
Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 180.592.000,- (79,61%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%; dan

2.2. Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Keagamaan.
Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 1.646.752.000,- (81,84%), realisasi fisik mencapai 100%.

d. Bagian Pengadaan Barang/Jasa

1. Program Pelayanan Administrasi Umum :

1.1. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan.
Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 127.043.000,- (93,07 %), sedangkan realisasi fisik mencapai 100 %; dan

1.2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya dan Sarpras Aparatur.
Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp145.468.000,- (87,73 %), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

2. Program Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa :

2.1. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan Barang /Jasa.
Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 169.360.000,- (92,55 %) sedangkan realisasi fisik mencapai 100%; dan

+ 4/10

2.2. Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 883.773.000,- (93,03 %), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

e. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

1. Program Pelayanan Administrasi Umum :

1.1. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 88.679.000,- (90,85 %), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%; dan

1.2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 31.630.000,- (57,2 %), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

2. Program Pengelolaan Perekonomian dan Administrasi Pembangunan :

2.1. Kegiatan Pengelolaan Perekonomian Daerah.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 107.243.000,- (97,49 %), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%; dan

2.2. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Pembangunan.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 78.016.000,- (78,02 %), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

f. Bagian Organisasi

1. Program Pelayanan Administrasi Umum :

1.1. Kegiatan Peningkatan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 153.427.000,- (95,75%), sedangkan realisasi fisik mencapai 66,67 %;

1.2. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 190.118.000,- (94,42%), sedangkan realisasi mencapai 100%; dan

✓ QK

1.3 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur.

Realisasi keuangan sampai Triwulan IV adalah Rp. 48.986.000,- (79,39%), sedangkan realisasi fisiknya mencapai 100%.

2. Program Pembinaan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi :

2.1. Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 270.560.000,- (77,3%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%;

2.2. Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 186.613.000,- (76,26%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%; dan

2.3. Kegiatan Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Pemda dan Reformasi Birokrasi.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 16.515.000,- (82,57%), sedangkan realisasi fisik 0 %.

g. Bagian Umum

1. Program Pelayanan Administrasi Umum :

1.1. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 1.093.176.000,- (70,6%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%; dan

1.2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Dan Sarana Prasarana Aparatur.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 6.227.935.000,- (71,69%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

2. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah :

2.1. Kegiatan Penerimaan Kunjungan dan Pelaksanaan Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp 1.639.216.000,- (80,78%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%.

✓ 16

h. Bagian Perlengkapan dan Keuangan

1. Program Pelayanan Administrasi Umum :

1.1. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 2.036.517.000,- (84,38%), sedangkan realisasi fisik mencapai 75%; dan

1.2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur.

Realisasi keuangan sampai triwulan IV adalah Rp. 9.358.845.000,- (88,38%), sedangkan realisasi fisik mencapai 75%.

Penjelasan dan narasi di atas akan dituangkan dalam tabel 2.1.

↳ 10

Tabel 2.1
Laporan Realisasi Hasil Renc. Penguat Daerah
SEKRETARIAT DAERAH
Periode Pelaksanaan : 2019

(* dalam ribu rupiah)

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Rencana OPD pada Tahun 2019 s/d 2019 (periode Rencana OPD)	Realisasi Capaian Kerja Rencana OPD s/d Rangka OPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran Rangk. OPD yang direvisinal	Realisasi Kinerja pada Tahunan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rangk. OPD yang direvisinal	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rangk. OPD yang direvisinal (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Revisi OPD s/d Tahun 2019 (Akhir Pelaksanaan Rangk. SKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Revisi OPD s/d Tahun 2018 (%)	Ket		
						I																		
						II				III				IV										
						7	8	9	10	11=7+8+9+10	12=11/6*100	13=5+11	14=13/4*100	15										
1	2	3	4	5	6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	16						
Program pada Setiap SKPD																								
1	Program Pelayanan Administrasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja penguat daerah			0																			
1.1	Peningkatan Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja	- Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan : Rangka Kerja	5 Dok	15.000	3.000	1.115	1	1.360	-	890	-	663	1	4.027	100	80.55	1	4.027	20	26.85				
1.2	Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan	- Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	12 Bhn	853.647	-	12 Bhn	181.717	3	38.422	3	22.924	3	67.844	3	23.738	12	152.928	100	84.16	12	152.928	100	17.91	
1.3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana	- Tersedianya sumber dan peningkatan kapasitas aparatur	12 Bhn	150.000	-	12 Bhn	30.000	3	2.901	3	2.380	3	7.192	3	10.666	12	23.129	100	77.1	12	23.129	100	15.42	
Rata - rata capaian kinerja (%)																								
Prediksi Kinerja																								
2	Program Fasilitas Tata Pemerintahan	Prosentase Fasilitas penyelenggaraan pemerintahan	1.243.227	0	286.456	0	0	0	55.31	158.434	24.8	71.051	80.11	229.484	80.11	229.484	0	18.46						
2.1	Fasilitas Pemerintahan Daerah	- Terlaksananya Pemerintahan Kelurahan Kerja, Rapat Kerja Kecamatan Village dan evaluasi kinerja kecamatan	100 %	458.227	-	12 Bhn	81.436	3	916	3	25.918	3	17.227	3	32.025	12	76.086	100	93.41	12	76.086	12	16.6	
2.2	Fasilitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Kerjasama	- Terselenggaranya penyelenggaraan LPPD di media massa, laporan pelaksanaan kerjanya daerah, dokumentasi LPPD	100 %	785.000	-	12 Bhn	205.000	3	11.316	3	36.176	3	66.881	3	39.026	12	153.398	100	74.83	12	153.398	12	19.34	
Rata - rata capaian kinerja (%)																								
Prediksi Kinerja																								
Rata - rata capaian kinerja SKPD (%)																								
Prediksi Kinerja																								
Program pada Setiap SKPD																								
1	Program Pelayanan Administrasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas Kinerja penguat daerah	676.470	0	139.544	0	0	0	47.71	65.577	19.2	26.784	66.9	93.361	66.9	93.361	0	15.8						
1.1	Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan	- Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	60 Bhn	442.030	12	88.360	12 Bhn	88.360	3	15.637	3	13.235	3	22.470	3	20.699	12	72.060	100	81.35	24	160.420	40	36.39
1.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana	- Tersedianya Sarana dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	60 Bhn	234.440	12	51.184	12 Bhn	51.184	3	3.261	3	4.940	3	7.014	3	6.086	12	21.301	100	41.62	24	72.485	40	30.92
Rata - rata capaian kinerja (%)																								
Prediksi Kinerja																								
Administrasi Pemerintahan																								
139.544																								

Handwritten signature/initials

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome/ Kegiatan Output)	Target Kinerja OPD pada Tahun 2019 s/d 2019 (periode Rencana OPD)	Realisasi Capaian Kerja Rencana OPD s/d Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran Realisasi OPD Tahun berjalan (2019) yang direalisasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan												Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi OPD yang direalisasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi OPD s/d Tahun 2019 (Akhir Pelaksanaan Realisasi SKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi OPD s/d Tahun 2018 (%)	Ket			
						I				II		III		IV										
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					13	14	15
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.	K
2	Program Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Rukun dan Penegakan HAM	Presentase peraturan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyelesaian penanganan kasus Penda	1.440,637	0	693,309	0	0	0	63,71	441,695	12,7	88,107	76,42	529,803	76,42	529,803	0	86,55						
		Presentase peningkatan produk hukum daerah yang diformulasikan																						
2.1	Realisasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Tersenyurnya rancangan produk hukum daerah	650 Draft	801,420	130 160,230	130 160,230	S2	36,117	46 11,119	180	42,100	224	31,720	502	121,086	386,15	75,55	632	281,286	97,23	35,1			
2.2	Pengujian dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	terdistribusikannya buku	1135	646,304	577,8 127,132	760 127,132	-	2,751 385	49,909	-	21,525	-	18,859	385	93,044	50,66	73,18	6160	220,196	588,3	34,07			
2.3	Realisasi Penanganan Masalah Hukum dan Penegakan HAM	Terselenggarakannya penanganan kasus pengadilan di lingkungan Perda	88%	1,913	7 405,927	7 405,927	-	206,389	2 32,814	2	38,970	-	37,529	4	315,702	57,14	77,77	11	721,635	12,5	37717,8			

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Rencana OPD pada Tahun 2019 s/d 2019 (periode Rencana OPD)	Realisasi Capaian Rencana OPD s/d Rencana OPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran Rencana OPD Tahun berjalan (2019) yang direalisasi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana OPD yang direalisasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana OPD yang direalisasi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana OPD s/d Tahun 2019 (Akhir Pelaksanaan Rencana OPD s/d 3KRP)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana OPD s/d Tahun 2018 (%)		Ket		
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II			I	II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
2	Program Penguatan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Rukmin dan Penguatan HAM	Presentase penguatan terhadap peraturan, perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan kasus Pemda	Rp. 1.449.637	K Rp. 0	Rp. 639.309	K 0	Rp. 0	K 0	Rp. 0	K 63.71	Rp. 441.695	K 12,7	Rp. 88.107	K 76,42	Rp. 529.803	K 76,42	Rp. 529.803	K 0	Rp. 36,56					
2.1	Realisasi Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Presentase peningkatan produk hukum daerah yang diterbitkan	650 Draft	801.420	130	160.230	130	160.230	52	36.117	46	11.119	180	42.100	224	31.720	502	121.056	386,15	75,55	632	281.286	97,23	35,1
2.2	Pengajuan dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan	terditerbitkannya buku Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2019 dan Himpunan Peraturan Bupati Tahun 2018	1135 Buku	646.304	5775	127.132	760	127.132	-	2.751.385	49.909	-	21.525	-	18.859	385	93.044	50,66	73,18	6160	220.196	533,3	34,07	
2.3	Realisasi Penanganan Masalah Hukum dan Penguatan HAM	Terselesaikannya penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda	88%	1.913	7	405.927	7	405.927	-	206.389	2	32.814	2	38.970	-	37.529	4	315.702	57,14	77,77	11	721.625	12,5	37717,8

Rata - rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Rata - rata capaian kinerja SKPD (%)

Predikat Kinerja

Predikat Kinerja

1	Program Penguatan Administrasi Umum	Indeks kemampuan masyarakat atas kinerja pemerintah daerah	1.142.936	0	239.816	0	0	0	47.86	114.786	28.6	68.477	76.46	183.363					76.46	183.363	0	16.04	Berlaku Kena
1.1	Penguatan Sistem Pemerintahan Keluar dan Pelayanan Capaian Kinerja	Dokumen perencanaan dan pelaksanaan : Rencana Kerja, RKPD, LKPD, Lahir/LKIP & LPPD	10.500	-	2.100	-	2	242	-	-	-	-	242	33.33	11.52	242	33.33	2.3					
1.2	Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Keuangan	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi dan Laporan Keuangan	12 Bln	305.348	-	12 Bln	182.948	3	40.172	3	20.465	3	22.935	3	54.741	12	138.313	100	75.6	12	138.313	100	45.3
1.3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sistem Pemerintahan Aparatur	Terselenggaranya serpus dan peningkatan kapasitas aparatur	12 Bln	827.088	-	12 Bln	54.768	3	10.750	3	6.424	3	13.798	3	13.836	12	44.808	100	81.81	12	44.808	100	5.42

Rata - rata capaian kinerja (%)

Predikat Kinerja

Predikat Kinerja

2	Program Penguatan Kesejahteraan Rakyat	Presentase fasilitas peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan kesehatan	313.843.861	0	2.339.076	0	0	0	60.75	1.360.311	20.9	467.034	81.61	1.827.344					81.61	1.827.344	0	0.58	
2.1	Realisasi dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Terselenggaranya penyediaan untuk umah bergengsi , Pengabdian bhab dan Bantuan Sosial , Cermat dan Bantuan Sosial , Bantuan Guru Non PNS dan Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data	12 Bln	299.861.700	-	5 Kgt	226.832	1	7.150	-	12.950	1	-	3	160.492	5	180.592	100	79.61	5	180.592	41.67	0.06

16

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Rencana OPD pada Tahun 2019 s/d 2019 (periode Rencana OPD)	Realisasi Capaian Rencana Kerja Anggaran OPD Tahun 2018 s/d Rencana OPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran Rencana OPD Tahun berjalan (2019) yang direvisi	Realisasi Kinerja pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana OPD yang direvisi	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana OPD yang direvisi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana OPD Tahun 2019 (Akhir Pelaksanaan Rencana SKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana OPD Tahun 2019 (%)	Ket
						I		II		III		IV								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10	12=11/6*100	13=6*11	14=13/4*100	15						
2.2	Fasilitas Kegiatan Keagamaan	- Terfasilitasinya kegiatan keagamaan selamatan dan Manambah; Kegiatan PHBI; Kegiatan Pengembangan Potensi Masyarakat Baitul (PBB) Kabupaten Kudus; Hiseb subsektor dan MTO	12 Bln Rp. 13.982.161	- Rp. -	K Rp. 2.012.224	K Rp. 2.175	K Rp. 545.353	K Rp. 812.783	K Rp. 17	K Rp. 286.442	K Rp. 1.546.752	K Rp. 100	K Rp. 1.546.752	K Rp. 216,7	K Rp. 11,78					

Rata - rata capaian kinerja (%)																				
Prediksi Kinerja																				

Program/jenis Setiap SKPD																					
1	Program Pelayanan Administrasi	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	0	0	0	0	0	42,06	64,316	36,6	55,993	78,68	120,309	78,68	120,309	0	0				
1.1	Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan	- Tersedianya pelaporan administratif dan pelaporan keuangan - Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD - Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD	-	97,616	3	14,301	3	12,870	-	13,950	-	47,558	6	88,679	-	90,85	6	88,679,00	0	0	Bagian Perencanaan dan Anggaran
1.2	Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur	- Mengingatnya Kapasitas sumber daya dan prasarana aparatur - Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang terencana sesuai ketentuan - Jumlah dokumen pengelolaan aset yang terencana sesuai ketentuan - Jumlah ASN yang kompeten	-	55,300	3	9,942	3	6,200	-	7,053	-	8,435	6	31,630	-	57,2	6	31,630	0	0	

Rata - rata capaian kinerja (%)																				
Prediksi Kinerja																				

2	Program Pengelolaan Perencanaan dan Administrasi Pembangunan	Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD	0	0	210.000	0	0	0	0	64,68	114.819	33,5	70.440	88,22	188,289	88,22	188,289	0	0
2.1	Pengelolaan Perencanaan Daerah	- Persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu - Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD	-	-	110.000	3	26,674	-	24,223	31,25	28.890	-	27,457	3	107,243	3	107,243	0	0
		- Persentase Obyek Sauran yang dilayani - Jumlah Palaporn Ekutinda, TTID dan TPAMD - Jumlah Perusa dengan Hasil Audit WTP - Jumlah Dokumen pelaporan realisasi penggunaan DHCCHT	-	-	-	7	18	17	8	3	42	11	5	9	-	42	11	0	0
			-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	9	75	5	0	0	0

YAN

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Rencana OPD pada Tahun 2019 s/d 2019 (periode Rencana OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Rencana OPD Tahun 2018	Target Kinerja dan Anggaran Rencana OPD Tahun berjalan (2019) yang direvisi	Realisasi Kinerja pada Tahunan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana OPD yang direvisi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana OPD yang direvisi (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana OPD s/d Tahun 2019 (Akhir Pelaksanaan Rencana SKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana OPD s/d Tahun 2018 (%)	Ket		
						I		II		III		IV										
						7	8	9	10	11	12	13	14	15								
1	2	3	4	5	6																	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
1.2	Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan	-Terwujudnya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan			12 Bln	201.343	3	61.240	3	44.451	3	48.700	3	35.637	12	190.118	100	12	190.118	0	0	
1.3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur	-Terwujudnya kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur			12 Bln	61.700	3	8.293	3	24.426	3	7.350	3	8.918	12	48.986	100	94,42	12	48.986	0	0
Rata - rata capaian kinerja (%)																			79,39			
Prediksi Kinerja																			88,85	69,85		
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						
Rata - rata capaian kinerja (%)																						
Prediksi Kinerja																						
Prediksi Kinerja																						

2020

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2020

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 yang dituangkan dalam Bab III ini adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi. Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab III ini didanai oleh Anggaran, Pendapatan, dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 yang terdiri dari 8 Program 18 Kegiatan dan prakiraan maju tahun 2021 adalah sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Umum :

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Pelaporan Keuangan;
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya dan Sarana Prasarana Aparatur; dan
3. Kegiatan Pelayanan Ketatausahaan Umum dan Kepegawaian.

II. Program Fasilitas Tata Pemerintahan :

1. Kegiatan Fasilitas Pemerintahan Daerah; dan
2. Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Kerjasama

III. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum dan Penegakkan HAM :

1. Kegiatan Fasilitas Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
2. Kegiatan Pengkajian dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan;
3. Kegiatan Fasilitas Penanganan Masalah Hukum dan Penegakan HAM; dan
4. Kegiatan Fasilitas Penanganan Masalah Hukum dan Penegakan HAM (DBHCHT).

IV. Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat :

1. Kegiatan Fasilitas dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial; dan
2. Kegiatan Fasilitas Kegiatan Keagamaan.

V. Program Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa :

1. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa;
2. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa; dan
3. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

VI. Program Peningkatan Perekonomian Daerah :

1. Kegiatan Pengembangan Perekonomian Daerah; dan
2. Kegiatan Pembinaan BUMD dan BLUD.

VII. Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan :

1. Kegiatan Penyusunan Program; dan
2. Kegiatan Pengendalian Program, Evaluasi dan Pelaporan.

VIII. Program Pembinaan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi :

1. Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah;
2. Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
3. Kegiatan Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Pemda dan Reformasi Birokrasi.

IX. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah :

1. Kegiatan Penerimaan Kunjungan dan Pelaksanaan Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

X. Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik :

1. Fasilitasi Komunikasi dan Informasi Pimpinan Daerah.

Perincian dan perbandingan antara Rencana Kerja Penetapan dengan Perubahan Rencana Kerja akan dituangkan dalam Tabel 3.1.

1 / 16

Tabel 3.1
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020
Kabupaten Kudus

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perubahan Rentry Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	APBD TA. 2020	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
4	01	Program pelayanan administrasi umum	Kab. Kudus	100%	2.500.000	-	Kab. Kudus	-	-	Kegiatan pindah ke Bagian Adm Pembangunan	
	01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Bagian Tapem	1 Dok	2.500.000	-	Bagian Pemerintahan	-	-		
	02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Kab. Kudus	100%	11.000.000	11.000.000	Kab. Kudus	100%	11.000.000		
		Hororarium pengelola keuangan	Bagian Tapem	5 Org	11.000.000		Bagian Pemerintahan	5 Org			
	03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Kab. Kudus	100%	196.217.000	196.217.000	Kab. Kudus	100%	196.217.000		
		Jasa surat menyurat	Bagian Tapem	1 Jenis	900.000		Bagian Pemerintahan	1 Jenis			
		Jasa perawatan peralatan dan perlengkapan kantor	Bagian Tapem	10 Unit	5.000.000		Bagian Pemerintahan	10 Unit			
		Jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas	Bagian Tapem	5 Unit	25.000.000		Bagian Pemerintahan	5 Unit			
		Makanan dan minuman harian pegawai	Bagian Tapem	2 Jenis	4.400.000		Bagian Pemerintahan	2 Jenis			
		Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Bagian Tapem	105 OH	60.442.000		Bagian Pemerintahan	105 OH			
		honorarium tenaga non pus (PHD)	Bagian Tapem	2 Org	77.500.000		Bagian Pemerintahan	1 Org		1 Orang PHD keluar	
		Alat tulis kantor	Bagian Tapem	20 Jenis	8.900.000		Bagian Pemerintahan	20 Jenis			
		Cetak dan pengandaan	Bagian Tapem	4 Jenis	3.000.000		Bagian Pemerintahan	4 Jenis			
		Bahan bacaan	Bagian Tapem	1 Jenis	3.200.000		Bagian Pemerintahan	1 Jenis			
		Makanan dan minuman rapat	Bagian Tapem	525 Dos	7.875.000		Bagian Pemerintahan	525 Dos			
4	01	Program fasilitas tata pemerintahan		100%	256.456.000			100%			
		Persentase fasilitas penyelenggaraan pemerintahan		100%				100%			

28

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perubahan Renc. Tahun 2020				
			Lokas	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	APBD TA. 2020	Lokas	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Keterangan	
											(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	01	Fasilitasi Pemerintahan Daerah	Tertaksananya Pertemuan Iktungtur Kerja, Rapat kerja perangkat wilayah dan evaluasi kinerja kecamatan	Kab. Kudus	37 Kali	80.000.000	80.000.000	Kab. Kudus	37 Kali	80.000.000	
		Fasilitasi pertemuan kunjungan kerja di kabupaten Kudus	Bagian Tipem	25 Kali	3.000.000		Bagian Pemerintahan	25 Kali			
		rapat kerja perangkat wilayah	Bagian Tipem	3 Kali	52.000.000		Bagian Pemerintahan	3 Kali			
		Evaluasi kinerja kecamatan	Bagian Tipem	9 Kec	20.000.000		Bagian Pemerintahan	9 Kec			
		Laporan SPM	Bagian Tipem	-	-		Bagian Pemerintahan	1 dok			
	02	Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Kerjasama	Tertaksananya Penayangan LPPD di media massa, tersunnya laporan pelaksanaan kerjasama daerah, dan dokumen LPPD	Kab. Kudus	3 Dok	176.456.000	245.561.000	Kab. Kudus	3 Dok	245.561.000	
		penayangan lppd di media massa	Bagian Tipem	2 Kali	56.000.000		Bagian Pemerintahan	2 Kali			
		Laporan pelaksanaan kerjasama daerah	Bagian Tipem	1 Dok	20.456.000		Bagian Pemerintahan	1 Dok			
		Dokumen LPPD	Bagian Tipem	1 Dok	100.000.000		Bagian Pemerintahan	1 Dok			
		Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban					Bagian Pemerintahan	1 Dok		Sud kegiatan baru pindahan dari Bappeda	
4	01	Program Pelayanan Administrasi	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Bagian Hukum	82	139.544.000	137.044.000	Bagian Hukum	82	137.044.000	Bagian Hukum
	01	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan laporan capaian kinerja	Tertaksananya peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan laporan capaian kinerja	Bagian Hukum	100 %	2.500.000	-	Bagian Hukum	100 %	-	
		Dokumen LKIP, dokumen penelipan kinerja									
		Dokumen perencanaan dan pelaporan	Bagian Hukum	12 dok	2.500.000		Bagian Hukum	-			
	02	Pelayanan administrasi da pelaporan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Bagian Hukum	4 orang	9.780.000	12.900.000	Bagian Hukum	4 orang	12.900.000	
	03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Honorarium panitia pelaksanaan ke Tersedianya Sarpras dan Peningkatan kapasitas aparatur	Bagian Hukum	4 orang	9.780.000	12.900.000	Bagian Hukum	4 orang	12.900.000	
					100 %	127.264.000	124.144.000	Bagian Hukum	100 %	124.144.000	
		Alat Tulis Kantor		Bagian Hukum	15 jenis	12.600.000	12.481.000	Bagian Hukum	14 jenis	12.481.000	
		Barang ceakan dan penggunaan		Bagian Hukum	25475 lbr	6.227.000	5.175.000	Bagian Hukum	21750 lbr	5.175.000	
		Buku peraturan perUuan		Bagian Hukum	60 buku	12.000.000	12.000.000	Bagian Hukum	40 buku	12.000.000	
		Bahan Becaan		Bagian Hukum	2 jenis	4.285.000	4.800.000	Bagian Hukum	2 jenis	4.800.000	

27

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perubahan Renc. Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	APBD TA. 2020	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
		Jasa surat menyurat	Bagian Hukum	3 jenis	1.000.000	1.000.000	Bagian Hukum	3 jenis	1.000.000		
		Makan minum pegawai dan rapat	Bagian Hukum	4 jenis	13.188.000	9.595.000	Bagian Hukum	3388 org	9.595.000		
		Biaya perjalanan dinas luar daerah	Bagian Hukum	50 OH	30.000.000	24.500.000	Bagian Hukum	48 OH	24.500.000		
		Jasa pemeliharaan gedung kantor (AC, printer, mesin ketik, mesin komputer, mesin foto copy)	Bagian Hukum	18 unit	13.663.000	10.633.000	Bagian Hukum	18 unit	10.633.000		
		Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas (penggantian suku cadang, bkm, stnk untuk roda dua dan roda empat)	Bagian Hukum	7 unit	32.801.000	43.960.000	Bagian Hukum	7 unit	43.960.000		
		Pemeliharaan rutin/berkala mebelur (perbaikan meja dan kursi kantor)	Bagian Hukum	10 unit	1.500.000	-	-	-	-		
4	01	4.01.03 36 Program Penataan peraturan perUtan, bantuan hukum dan penegakkan HAM	Bagian Hukum	100 %	526.852.000	519.852.000	Bagian Hukum	100 %	519.852.000		
		Perentase peningkatan produk hukum daerah yang diformasikan	Bagian Hukum	100 %			Bagian Hukum	100 %			
		Terdistribusinya penyusunan Rancangan Produk Hukum	Bagian Hukum	130 draft	167.000.000	160.000.000	Bagian Hukum	130 draft	160.000.000		
		Jumlah rancangan produk hukum yang tersusun	Bagian Hukum	130 draft	167.000.000	160.000.000	Bagian Hukum	130 draft	160.000.000		
	02	Pengajian dan publikasi peraturan perUtan	Bagian Hukum	760 buku	159.852.000	159.852.000	Bagian Hukum	760 buku	159.852.000		
		Jumlah buku Himpunan Lembaran Daerah dan Himpunan Peraturan Bupati	Bagian Hukum	760 buku	159.852.000	159.852.000	Bagian Hukum	760 buku	159.852.000		
	03	Facilitasi penanganan masalah hukum dan penegakkan HAM	Bagian Hukum	100 %	205.927.000	205.927.000	Bagian Hukum	100 %	205.927.000		
		Terdistribusinya Penanganan Perkara Perenda dan Pelaporan RANHAM	Bagian Hukum	100 %	205.927.000	205.927.000	Bagian Hukum	100 %	205.927.000		
		Prosentase tertanganinya perkara Perenda	Bagian Hukum	100 %	185.927.000	185.927.000	Bagian Hukum	100 %	185.927.000		
		Jumlah dokumen Rarahan yang dilaporkan	Bagian Hukum	2 dokumen	20.000.000	20.000.000	Bagian Hukum	2 dokumen	20.000.000		
	04	Facilitasi penanganan masalah hukum dan penegakkan HAM (DBH/CHT)	Bagian Hukum	9 kali	200.000.000	200.000.000	Bagian Hukum	450 orang	200.000.000		
		Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi peraturan perUtan bidang cukai	Bagian Hukum	450 orang	200.000.000	200.000.000	Bagian Hukum	450 orang	200.000.000		

X
16

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020					Perubahan Renja Tahun 2020				Keterangan	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	APBD TA. 2020	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif				
										(4)	(5)		(6)
(1)	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah											
	Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	Terusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan Renja	Kab. Kudus	6 Dok	2.100.000								Kegiatan pindah ke Bagian Administrasi Pembangunan
		Dokumen perencanaan dan pelaporan : Renstra, Renja, RKPD, LKPD, Lajp/LKJP & LPPD	Kab. Kudus	6 Dok	2.100.000								
4	01	4.01.03 07 02 Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan											
		Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Kab. Kudus	96 OB	27.600.000	27.600.000	Kab. Kudus	100%	27.600.000				
		Honorarium panitia pelaksanaan kegiatan		96 OB	27.600.000								
		Honorarium panitia pelaksanaan kegiatan					Bag. Kesra	9 Org	27.600.000				
4	01	4.01.03 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur											
		Tersedianya sarana dan peningkatan kapasitas aparatur	Kab. Kudus	100%	206.068.000	206.068.000	Kab. Kudus	100%	208.018.000				
		Belanja alat tulis kantor	Bag. Kesra	32 jenis	16.331.000								
		Belanja perangko, material dan benda pos lainnya	Bag. Kesra	500 Lbr	2.100.000								
		Belanja palak kendaraan bermotor	Bag. Kesra	8 Unit	4.200.000								
		Belanja surat kabar/majalah	Bag. Kesra	12 Eksp	1.900.000								
		Belanja cetak, belanja penggantian	Bag. Kesra	2500 Lbr	2.900.000								
		Belanja makan dan minum pegawai	Bag. Kesra	3289 Gelas	9.867.000								
		Belanja makan dan minum rapat	Bag. Kesra	1007 Dos	20.130.000								
		Perjalanan dinas dalam daerah	Bag. Kesra	274 OH	23.700.000								
		Perjalanan dinas luar daerah	Bag. Kesra	110 OH	52.020.000								
		Belanja jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor	Bag. Kesra	12 Kali	12.000.000								
		Belanja jasa servis kendaraan dinas	Bag. Kesra	7 Kali	13.952.000								
		Belanja penggantian suku cadang kendaraan dinas	Bag. Kesra	19 Bn	9.216.000								
		Belanja bahan bakar minyak	Bag. Kesra	3432 Litre	37.752.000								
		Alat Tulis Kantor				11.897.000	Bag. Kesra	32 Jenis	13.847.000				
		perangko, material dan benda pos lainnya				1.950.000	Bag. Kesra	2 Jenis	1.950.000				
		surat kabar/majalah				1.800.000	Bag. Kesra	1 Jenis	1.800.000				

176

RPK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perubahan Rengja Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	APBD TA. 2020	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
		Jasa perawatan peralatan dan perlengkapan kantor			8.428.000	Bag. Kesra		9 Unit	8.428.000		
		Jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas			64.466.000	Bag. Kesra		7 Unit	64.466.000		
		Cetak dan penggandaan			18.500.000	Bag. Kesra		5 Jenis	18.500.000		
		Makanan dan minuman harian pegawai			19.089.000	Bag. Kesra		16 Org	19.089.000		
		Makanan dan minuman rapat			23.850.000	Bag. Kesra		1.327 Org	23.850.000		
		Perjalanan dinas dalam daerah			19.500.000	Bag. Kesra		220 OH	19.500.000		
		Perjalanan dinas luar daerah			36.588.000	Bag. Kesra		61 OH	36.588.000		
	Program peningkatan kesejahteraan rakyat	Persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan	Kab. Kudus		91.428.124.000	41.428.726.000			41.428.726.000		
4	01	4.01.03 41 01 Fasilitasi dan peningkatan kesejahteraan sosial	Bag. Kesra	12 kali	88.931.594.000	38.631.794.000	Kab. Kudus	100%	38.631.794.000		
		Terfasilitasinya honor guru keagamaan, Honor tenaga pelaksana kegiatan, Operasional dan Koordinasi	Bag. Kesra	12 Bin	88.224.000.000						
		Honor kesejahteraan guru swasta bidang keagamaan (madin, tpa, diakonia, jipuns)	Bag. Kesra	12 Kali	303.074.000						
		Fasilitasi kegiatan sosial (kesehatan, pendidikan dan sosial)	Bag. Kesra	9 Bin	86.040.000						
		Fasilitasi guru swasta bidang keagamaan	Bag. Kesra	5 Kali	249.638.000						
		Fasilitasi imam, khotb marbot (pengurus tempat ibadah)	Bag. Kesra	2 Kali	66.842.000						
		Honorarium non PNS			37.924.200.000	Bag. Kesra		87.492 OB	37.924.200.000		
		Alat Tulis Kantor			100.270.000	Bag. Kesra		35 Jenis	100.270.000		
		Jasa Kantor			3.800.000	Bag. Kesra		10 Kali	3.800.000		
		Jasa tenaga pelaksana kegiatan			79.866.000	Bag. Kesra		36 OB	79.866.000		
		Premi asuransi			6.840.000	Bag. Kesra		36 OB	6.840.000		
		Cetak dan penggandaan			723.000	Bag. Kesra		1 Jenis	723.000		
		Sewa perlengkapan dan peralatan kantor			24.255.000	Bag. Kesra		1 Jenis	24.255.000		
		Makanan dan minuman rapat			303.840.000	Bag. Kesra		13.505 Org	303.840.000		
		Perjalanan dinas dalam daerah			48.775.000	Bag. Kesra		551 OH	48.775.000		
		Perjalanan dinas luar daerah			71.725.000	Bag. Kesra		402 OH	71.725.000		
		Jasa tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber			67.500.000	Bag. Kesra			67.500.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perubahan Rencan Tahun 2020				Keterangan			
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	APBD T.A. 2020	Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif					
										(1)		(2)	(3)	(4)
4	01	4.01.03	07	02	Program Pelayanan Administrasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Kab Kudus	1 dok	16.300.000	16.300.000	Kab Kudus	1 dok	16.300.000	Bagian Perekonomian
						Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standar		6 dok				6 dok		
						Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD sesuai standar								
						Jumlah Pengelola Kegiatan/Keuangan PD						6 orang		
4	01	4.01.03	07	03	Peningkatan Kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan	Kab Kudus	16 dok	129.120.000	118.700.000	Kab Kudus	12 dok	118.700.000	
						Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan		60 dok				12 dok		
						Jumlah ASN yang kompeten		9 org				8 org		
4	01	4.01.03	38		Program Pengelolaan Perekonomian dan Administrasi Pemerintahan	Prosentase pelaksanaan rekomendasi TPID		80%	200.000.000					
						Prosentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD		6%						
						Prosentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu		87%						
4	01	4.01.03	38	01	Pengelolaan Perekonomian Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Ekuitas, TPID dan TPAKD	Kab Kudus	11 Dok	120.000.000					
						Jumlah dokumen pelaporan realisasi penggunaan DBHCHT		12 Dok						
						Jumlah Petrusda dengan hasil Audit WTP		3 Petrusda						
4	01	4.01.03	38	02	Pengelolaan administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen pelaporan realisasi kegiatan dan dan keuangan PD	Kab Kudus	12 Dok	80.000.000					
						Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Bangguh		1 Dok						
						Tersedianya Aplikasi Sistem Pelaporan Perkembangan Kegiatan OPD		1 Unit						
4	01	4.01.03	37		Program Peningkatan Perekonomian Daerah	Prosentase pelaksanaan rekomendasi TPID		81%	110.000.000					
						Prosentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD		6%						
4	01	4.01.03	37	01	Pengembangan Perekonomian Daerah	Jumlah dokumen pelaporan Ekuitas, TPID dan TPAKD		11 Dok	80.000.000					
						Jumlah dokumen pelaporan realisasi penggunaan DBHCHT		12 Dok						

746

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kepgiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Perubahan Renc. Tahun 2020					Keterangan
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	APBD TA. 2020	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
4	01 4.01.03 37 02	Pembinaan BOMD BLUD	Jumlah Pertuda dengan hasil Audit WTP					5 Pertuda	30.000.000		
4	01 4.01.03 07 02	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah			100.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan	83	100.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan	
4	01 4.01.03 07 02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD Terdapatnya honorarium PNS pengelola kegiatan/keuangan PD			16.000.000		7,00 Dok 6,00 Org	16.000.000		
		03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang terakumulasi secara ketuntasan Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang terakumulasi secara ketuntasan Jumlah belanja sarana dan prasarana aparatur Jumlah sarana dan prasarana aparatur kantor yang tersedia			84.000.000		12 Dok 12 Dok 14 Jenis	84.000.000		
4	01 4.01.03 45	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan	Persentase penyusunan program pembangunan daerah yang tepat waktu Persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu			120.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan	100%	120.000.000		
		01 Penyusunan program pembangunan daerah	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah: (Renstra, Renja, RKPD dan KUA PPAS Setda)			40.000.000		4,00 Dok	40.000.000		
			Jumlah dokumen program pembangunan daerah					1,00 Dok			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perubahan Renja Tahun 2020			
			Lokasi	Target capaian Kibaca	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	APBD TA. 2020	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	02 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan realisasi kegiatan dan keuangan PD				80.000.000		12,00 Dok		
		Jumlah dokumen pelaporan kegiatan BangGub						1,00 Dok		
		Jumlah dokumen LKIP/SAKIP, LPPD, LKPJ Setda						3,00 Dok		
4	01 4.01.03 07 Program pelayanan administrasi umum	Indek Kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	Kab. Kudus	82%	295.239.000	379.850.000				Bagian PAJ
4	01 4.01.03 07 02 Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Kab. Kudus	12 Bn	131.239.000	136.500.000				
		Alat tulis kantor		41 Jenis						
		Bahan bacaan dan peraturan		24 Eksp						
		Pengundang undangan		6 Jenis						
		Borang cetak dan								
		Pengundangan								
		Honorarium Pelaksanaan Kegiatan dan lembur raih PNS		4 Org						
		Asa surat menyurat		380 Lbr						
		Maklumat minuman pegawai dan rapat		4180 Org						
		Kapal, rapat koordinasi dan biaya perjalanan dinas		74 Kali						
4	01 4.01.03 07 03 Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Terselenggaranya peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Kab. Kudus	21 Orang	164.000.000	243.350.000				
		Biaya servis dan pembelian		19 Unit						
		Biaya servis peralatan kantor								
		Uang servis perjalanan dan perjalanan kantor		10 Kali						
		Jumlah peserta diklat bagi aparatur Bagian Pengaduan		6 Org						
		Barang/Jasa								
		Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dinas		6 Unit						
		Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional (2 unit mobil dinas, 4 unit sepeda motor dinas)		6 Unit						
		Terperutnya kebutuhan Bahan Bakar Minyak, Gas dan Pelmaks		2534 Liter						
4	01 4.01.03 40 Program Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase fasilitasi proses pengadaan barang/jasa sesuai standar pelayanan		100%	1.083.694	-				

Handwritten signature/initials.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perubahan Renja Tahun 2020			
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	APBD TA. 2020	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	Keterangan
	(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	01	4.01.03 40 01	Perencanaan dan Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Perencanaan dan Pengendalian Barang/Jasa	Kab. Kudus	12 Bn	171.694	-	-	
				Pelaksanaan TE/PA	10 Kali					
				Pengadaan LPSE	16 Org					
				Sosialisasi pengadaan barang/jasa	5 Kali					
4	01	4.01.03 40 02	Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Kab. Kudus	276 Pkt	912.000	-	-	
4	01	4.01.03 40 04	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Kab. Kudus	149.406.000	100%	149.406.000		
				Sosialisasi pengadaan barang/jasa	5 Kali					
4	01	4.01.03 40 05	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa	Kab. Kudus	1.059.277.000	100%	1.059.277.000		
				Capacity Building	1 paket					
4	01	4.01.03 40 06	Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik	Terlaksananya layanan pengadaan secara elektronik	Kab. Kudus	341.456.000	100%	341.456.000		
				Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa	1 paket					
1				PROGRAM PADA SETIAP SKPD		320.615.000			320.615.000	
4	01	4.01.03 07 02	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		320.615.000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	83	320.615.000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	01	4.01.03 07 03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Jumlah Dokumen perencanaan, penelausahan dan pelaporan keuangan yang sesuai standar		320.615.000		2,00 Dok	320.615.000	
				Tersedianya honorarium PNS dan Non PNS				10,00 Org		
				Tersedianya Uang Lembur PNS dan Non PNS				20,00 Org		
2	10			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		323.170.000			323.170.000	
2.10	4.01	4.01.03 19	Program pengelolaan komunikasi dan informasi publik			323.170.000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		323.170.000	

506

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Perubahan Renc. Tahun 2020			Keterangan
			Lokasi (4)	Target capaian Kinerja (5)	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif (6)	APBD T.A. 2020 (7)	Lokasi (8)	Target capaian Kinerja (9)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
2.10	4.01	19	03	Fasilitasi komunikasi dan informasi pimpinan daerah			323.170.000		
				Cakupan informasi yang dipublikasikan melalui berbagai media			100%		
				Jumlah Jasa Penghargaan (Plakat Lambang Daerah)			100.00 Bh		
				Jumlah Belanja Cetak untuk kebutuhan Keprotokolan			10.00 Jernis		
				Jumlah Karangga Bunga			116.00 Bh		
				Jumlah Fasilitasi Komunikasi (Rapat Pimpinan/ Rapat, Coffee Morning Pimpinan dan insan media			20.00 Kali		
				Jumlah Publikasi Media Cetak			5000.00 -		
				Publikasi Media Elektronik			1.00 Kali		
4				ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					
4	01	4.01.03	07	Program pelayanan administrasi umum			101.520.000		
				Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah			83		
4	01	4.01.03	07	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan			101.520.000		
				Jumlah dokumen perencanaan, penelausahaan dan pelaporan keuangan yang tersusun sesuai standar			2,00 Dok		
				Tertaksananya pengeluaran kendaraan bermotor			4,00 Unit		
4	01	4.01.03	16	Program peningkatan pelayanan kedisnasan kepala daerah/ wakil kepala daerah			1.408.029.000		
				Persentase kelancaran pelayanan kedisnasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah			100%		
4	01	4.01.03	16	Penerinaan kunjungan dan pelaksanaan koordinasi kepala daerah/wakil kepala daerah			1.408.029.000		
				Jumlah Pelayanan Kunjungan dan Pelaksanaan koordinasi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah			190.00 Kali		

8
16

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Perubahan Rencja Tahun 2020					Keterangan				
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	APBD T.A. 2020	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif						
										(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
	Program Pelayanan Administrasi Umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		82%	145.420.000										Bagian Organisasi
4	01 4.01.03 07 02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Kab. Kudus	1 dok	16.300.000										
		Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standar													
		Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan PD sesuai standar	Kab. Kudus	6 dok											
4	01 4.01.03 07 03	Peningkatan Kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Kab. Kudus	16 dok	129.120.000										
		Jumlah dokumen pengelolaan SDM yang tersusun sesuai ketentuan													
		Jumlah dokumen pengelolaan aset yang tersusun sesuai ketentuan	Kab. Kudus	60 dok											
		Jumlah ASN yang kompeten	Kab. Kudus	9 org											
4	01 4.01.03 07	Program Pelayanan Administrasi Umum		82%		140.143.000									
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah													
4	01 4.01.03 07 02	Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	Kab. Kudus			28.300.000			9 orang		28.300.000				
		Jumlah pengelolaan/kegiatan PD													
4	01 4.01.03 07 03	Peningkatan Kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur				111.843.000			100 kali		111.843.000				
		Jumlah Selpras aparatur hantor yang terpelihara													
		Jumlah perjalanan dinas dalam setahun							100 kali						
		Program pembinaan kelembagaan, ketatakelolaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi		88%	735.000.000	639.200.000					639.200.000				
		Indeks Kepuasan Masyarakat		82											
		nilai akuntabilitas kinerja		72,5											
		Indeks Reformasi Birokrasi		74											
		cakupan pembinaan kelembagaan, ketatakelolaan dan pelayanan publik, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan reformasi birokrasi		100%											

792

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perubahan Rencja Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	APBD TA. 2020	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
4	01	4.01.03	42	01	Fasilitasi kelembagaan perangkat daerah	Jumlah perangkat daerah yang terfasilitasi penataan kelembagaan sesuai peraturan perUuan	Kab. Kudus	3 OPD	460.000.000	321.000.000	
					Jumlah PD yang terfasilitasi penyusunan standar kompetensi jabatan (skj) sesuai ketentuan yang berlaku	Kab. Kudus	7 OPD				
					Jumlah PD yang terfasilitasi penyusunan anjab dan eyjab sesuai ketentuan yang berlaku	Kab. Kudus	7 OPD				
4	01	4.01.03	42	02	Fasilitasi Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik	Jumlah dokumen ketatalaksanaan yang tersusun	Kab. Kudus	3 dok	235.000.000	178.200.000	
					Jumlah OPD yang telah difasilitasi pelaksanaan ketatalaksanaan dan pengembangan pelayanan publik	Kab. Kudus	34 OPD				
					Jumlah OPD yang nilai IKMnya dengan kategori baik (A)	Kab. Kudus	6 OPD				
4	01	4.01.03	42	03	Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen bidang akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang tersusun tepat waktu	Kab. Kudus	1 dok	40.000.000		
					Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan RB	Kab. Kudus					
4	01	4.01.03	42	03	Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen bidang akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi yang tersusun tepat waktu	Kab. Kudus	1 dok	140.000.000	140.000.000	
					Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan RB	Kab. Kudus					
					Jumlah dokumen LKJP dn Perjanjian Kinerja	Kab. Kudus	2 dok				

4	01	4.01.03	07		Program Pelayanan Administrasi umum	Bagian Umum	82%	10.555.449.000	APBD TA. 2020	Bagian Umum	82%	29.885.030.000	Bagian Umum
4	01	4.01.03	07	02	Pelayanan Administrasi dan pelaporan Keuangan	Bagian Umum	19 Dok	1.535.004.000		Bagian Umum	189 dokumen	575.360.000	

8

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Perubahan Renja Tahun 2020				Keterangan	
			Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikator	APBD T.A. 2020	Lokasi	Target capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikator			
										(1)		(2)
		Tersedianya Honorarium PNS dan Non PNS serta Honorarium Tim Pengabdian Berbagi Jasa		25 org								
		Tersedianya uang lembur PNS dan Non PNS		47 org								
4	01 4.01.03 07 03	Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	Bagian Umum	74 org	9.020.445.000		Bagian Umum		28.079.006.000			
		Tersedianya pengelolaan rumah dinas		3 buah								
		Tersedianya pengelolaan kendaraan bermotor		71 unit								
		Jumlah Pengadaan Bahan Pakai Habis dan Bahan Material						8 jenis				
		Jumlah Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur kantor						31 jenis				
		Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor						53 jenis				
		Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana di Lingkungan Kantor Bupati						7 Paket				
4	01 4.01.03 07 06	Pelayanan Ketatausahaan Umum dan Kepegawaian	Bagian Umum				Bagian Umum	17 Dokumen	1.230.664.000			
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Umum dan Kepegawaian yang Tersusun sesuai Standar						29 Orang				
		Jumlah ASN dan PHD yang Mendapat Honor dan Uang Lembur						7 Jenis				
		Jumlah Jenis Belanja Barang Jasa Yang Tersedia (ATK, Surat Kabar/Majalah, Jasa Pengiriman, Premi Asuransi Kesehatan, Cetakam, Perjalanan Dinas dan Kursus/Diklat										
		Jumlah Buku Ilmu Sosial						29 Buah				
4	01 4.01.03 16	Program Peningkatan Pelayanan Kedisnasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Bagian Umum	100%	2.449.443.000							
		Persentase pelaksanaan pelayanan kedisnasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah										
4	01 4.01.03 16 08	Peningkatan Kunjungan dan Pelaksanaan Koordinasi Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah	Bagian Umum	30.826 orang	2.449.443.000							
		Terselenggaranya fasilitasi kunjungan kerja / tamu yang diterima KDH dan wakil KDH										

7 06

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020			Perubahan Renda Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Tarjet capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	APBD TA. 2020	Lokasi	Tarjet capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Terlaksananya fasilitas kegiatan protokolerd KDH/Wakil KDH/ yang tmewakili		2.500 kali						

✓
Dik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 28) yang mengatur Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Desember 2019

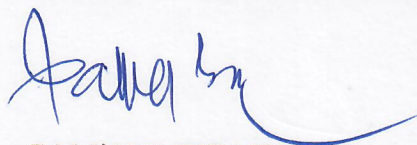
Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 65

✓ QK

BAB IV
PENUTUP

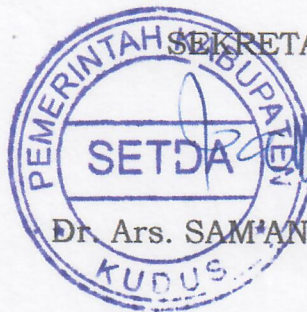
Penyusunan Perubahan Renja ini dilakukan dalam upaya mencapai target tahun 2020, seluruh perubahan yang terjadi dalam program/kegiatan tahun 2020 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaan hingga akhir tahun 2020.

Perubahan Renja Tahun 2020 Sekretariat Daerah diharapkan dapat memaksimalkan capaian program dan kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan APBDP Tahun 2020.

Akhirnya seluruh unsur di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dapat mempedomani isi dokumen Perubahan Renja Sekretariat Daerah ini dengan sebaik-baiknya.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN SEKDA	
3.	KEPALA DINAS : BADAN	
4.	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	
5.	BAGIAN HUKUM	

Kudus, 30 Desember 2019



SEKRETARIS DAERAH

Dr. Ars. SAM'ANI INTAKORIS, ST, MT

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

HARTOPO